

PENERAPAN *BLUE ECONOMY* PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN PESISIR BALI UTARA, SINGARAJA

I Kadek Donny Wishanesta

I Gede Putra Perdana

Putu Rana Janendra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Penerapan *Blue economy* pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Pesisir Bali Utara, Singaraja”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis *Blue economy* di Kawasan Pesisir Bali Utara, Singaraja, serta untuk mengetahui pengembangan apa saja yang telah dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang pariwisata dan perikanan, serta untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terbuka dan mendalam, observasi lapangan dan hasil dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis *Blue economy* di Kawasan Pesisir Bali Utara, Singaraja. Pengembangan ekonomi yang dilakukan pemerintah terutama pada sektor kepariwisataan dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti Pembangunan proyek jalan tol (*shortcut*) menuju singaraja, hotel dan penginapan sebagai akses penunjang serta pemberdayaan masyarakat dan para pemilik usaha. Dalam proses Pembangunan proyek pemerintah tersebut memberikan dampak pada masyarakat sekitar, khususnya dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas peluang tenaga usaha dan kerja, selain itu mendorong peningkatan dan pertumbuhan dibidang pembangunan sektor lain. Namun, pada aspek lingkungan proses pembangunan infrastruktur dan proyek yang dibangun, masyarakat merasa dirugikan dikarenakan kurang optimalnya pola antisipasi dan pengendalian lingkungan.

Kata Kunci: *Pariwisata Berkelanjutan, Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan Masyarakat, Welfare, Well-Being, and Poverty*

ABSTRACT

*The research is titled “The Application of the Blue economy in the Development of Sustainable Tourism in the Northern Bali Coastal Area, Singaraja.” This is a qualitative study aimed at understanding the development of Blue economy-based economic activities in the Northern Bali Coastal Area, Singaraja, as well as identifying the developments that have been carried out by the government, particularly in the fields of tourism and fisheries, and assessing the economic, social, and environmental impacts. This study employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including open-ended and in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study on the development of Blue economy-based economic activities in the North Bali Coastal Area, Singaraja. The economic development carried out by the government, particularly in the tourism sector, has been implemented through various activities such as the construction of a toll road (*shortcut*) to Singaraja, hotels and accommodations as supporting infrastructure,*

and the empowerment of communities and business owners. In the process of implementing these government projects, there have been impacts on the surrounding community, particularly in reducing unemployment rates, increasing community income, expanding business and employment opportunities, and promoting growth and development in other sectors. However, in terms of environmental aspects, the construction of infrastructure and projects has caused the community to feel disadvantaged due to inadequate environmental anticipation and control measures.

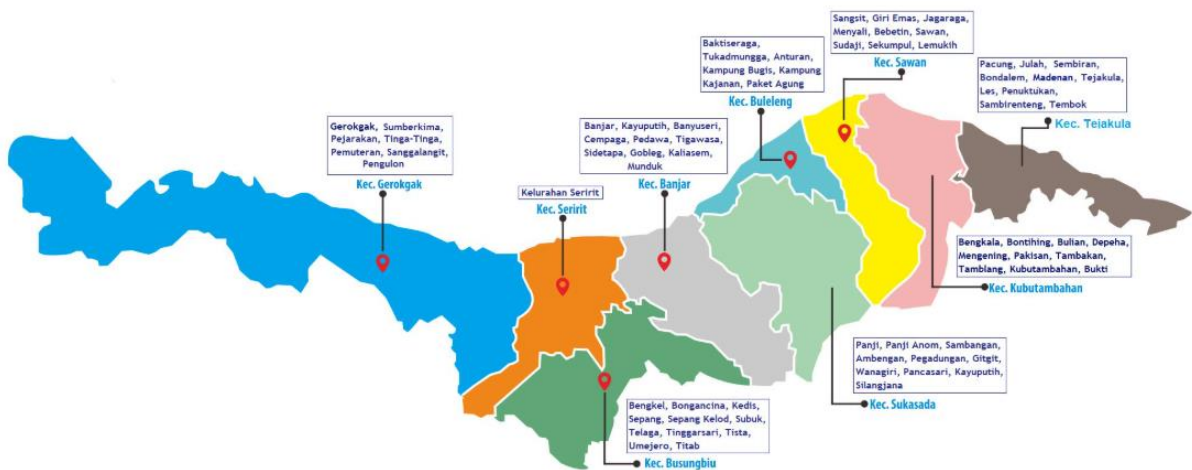
Keywords: *Sustainable Tourism, Coastal Communities, Blue Economy, Welfare, Well-Being, And Poverty*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dengan laut yang luas sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki potensi wisata alam yang banyak dan beragam. Salah satu jenis pariwisata tersebut adalah wisata bahari dan pesisir. Persoalan kemudian timbul, ketika terjadi ketidakmampuan dan kesenjangan kualitas dalam proses mengidentifikasi, merencanakan, mengelola, mengawasi, mengoptimalkan, dan menjaga keberlanjutan potensi daerah kepulauan tersebut. Berkaitan dengan pengelolaan kelautan melalui pendekatan ekosistem kemudian dikenal istilah *Blue economy*, yang berlandaskan pada integrasi tiga pilar, yaitu pilar ekosistem, ekonomi dan sosial. Pada tahun 2010, Gunter Pauli mengedepankan konsep “Ekonomi Biru” dalam bukunya “*The Blue economy*”. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab berkembangnya peralihan dari darat ke laut, juga karena mengingat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konsep *Green Economy* saja tidak cukup dibarengi dengan *Blue economy*. Penerapan konsep pembangunan kelautan yang berbasis *Blue economy* merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Konsep *Blue economy* bertujuan untuk menciptakan suatu industri yang ramah lingkungan, sehingga bisa tercipta pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan (KKP, 2014). Pengembangan konsep *Blue economy* sangat sesuai dengan konsepsi *blue growth* FAO yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Menurut UU No. Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kegiatan perikanan dan pariwisata dapat diintegrasikan ke dalam bentuk

pariwisata. Menurut Dermawan dan Azis (2012); Hakim (2013), pariwisata secara terminologi diartikan sebagai pendekatan pengelolaan berbasis konservasi yang terintegrasi dengan fokus pada pengembangan pariwisata perikanan dan bahari. Pariwisata bahari dan pesisir sebagai salah satu segmen terbesar dari sektor ekonomi maritim, serta komponen terbesar dalam industri pariwisata, seringkali menimbulkan kontroversi mengenai dampak lingkungan dan kesesuaian dengan aktivitas manusia lainnya. Penerapan konsep ekonomi biru dan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan sumber daya alam merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep Ekonomi Biru menawarkan konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekosistem, dimana pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial. Selain itu, konsep ekowisata juga menawarkan kegiatan wisata yang mengutamakan aspek pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga lokasi penerapan *Blue economy* yaitu, Nusa Penida, Bali utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur (KKP, 2014). Salah satu adalah Bali Utara merupakan salah satu destinasi pariwisata yang menawan, dengan berbagai daya tarik yang berbeda dari Bali Selatan. Bali Utara menawarkan keindahan alam yang masih asri, seperti air terjun, danau, pantai, dan bukit.

Gambar 1. Destinasi Pariwisata Berdasarkan Kecamatan Di Singaraja



Sumber: Dinas Pariwisata Buleleng, 2025

Pada gambar peta diatas menunjukkan tempat pariwisata yang berada pada di singaraja dengan seluruh kecamatan yang ada. Saat ini yang menjadi objek penelitian berada pada Kecamatan Banjar, Desa Banjar. Beberapa tempat wisata populer di Bali Utara antara lain Pantai Lovina, Air Terjun, Air Panas, Danau Tamblingan, Pura Ulun Danu Beratan,

dan Kebun Raya Bedugul. Bali Utara menjadikan salah satu kawasan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menerapkan konsep ekonomi biru, dan pariwisata merupakan salah satu dari sembilan rencana utama konsep ekonomi biru. Namun dengan berkembangnya wisata bahari dan pesisir serta proyek- proyek unggulan juga menimbulkan permasalahan kerusakan lingkungan, akibat pembangunan gedung dan kegiatan pariwisata serta semakin terkikisnya bukit-bukit yang dikhawatirkan bisa menimbulkan longsor. Sehingga perlu ditemukan langkah pemecahan masalah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta potensi kelautan dan perikanannya yang bisa menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Masalah lainnya juga timbul ketika pembangunan sektor penunjang yang merupakan program dari pemerintah menimbulkan banyak konflik sosial di masyarakat, seperti tergesernya masyarakat pesisir oleh pihak swasta yang cenderung menjadi penonton diwilayah sendiri. Maka dari itu, perlu adanya upaya dari pemerintah atau meningkatkan daya saing ekonomi bagi msyarakat pesisir dalam mengoptimalkan potensi wilayahnya secara berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam hal pembangunan proyek-proyek pemerintah yang sedang digalakkan. *Blue economy* merupakan instrument yang dapat digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan dengan bekerjasama dalam pengembangan antara *stakeholder* dan masyarakat di wilayah pesisir dengan memperhatikan sistem Ekologi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Blue economy

Konsep ekonomi biru pertama kali dikenalkan oleh Gunter Paulli dengan meninjau kekurangan konsep ekonomi hijau, salah satu diantaranya yaitu masalahmakanan organik yangmembutuhkan biaya besar untuk mendapatkannya karena makanan organik tersebut tidak diproduksi diseluruh penjuru negeri. Gunter Paulli melalui konsep *Blue economy* mencoba menawarkan solusi untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan secara nyata telah merusak lingkungan. Ekonomi biru meliputi banyak kegiatan, termasuk perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, perubahan iklim, dan penanganan limbah.

Prinsip Penerapan *Blue economy* Prinsip yang diterapkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep *blue economy* antara lain:

1. Terintegrasi antara ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi, kebijakan pusat, daerah, dan lintas sektor.
2. Berbasis kawasan. Yakni kawasan ekonomi potensial dan lintas batas ekosistem, wilayah administratif, dan lintas sektor.
3. Sistem produksi bersih, efisien tanpa limbah, bebas pencemaran, dan tidak merusak lingkungan.
4. Investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model *blue economy*. Selanjutnya, berkelanjutan. Seimbang antara pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Wisata bahari dan Pesisir

Menurut Sarwono dalam Gautama (2011), wisata bahari adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan diatas maupun di bawah permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Mira, Maulana Firdaus, dan Elly Reswati yang berjudul “Penerapan Prinsip *Blue economy* di Wilayah Brebes Jawa Tengah” Terdapat tiga usaha perikanan dan kelautan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang telah menerapkan prinsip-prinsip *blue economy* seperti pada usaha longyam, polikultur, dan usaha pengolahan kulit ikan menjadi kerupuk. Kendala dalam penerapan sistem usaha terpadu antara peternakan ayam dan usaha perikanan di desa Kaliwlingi adalah sistem usaha ini tidak dilakukan dengan massal pada suatu wilayah, hanya beberapa RTP saja. Hasil penelitian Rendi Prayuda Dian Venita Sary yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep *Blue economy* Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di era MEA” menunjukkan bahwa Pemerintah dinilai kurang dalam mengupayakan pengoptimalisasi potensi khususnya di wilayah pesisir, selain itu, sosialisasi pemerintah terkait MEA belum terealisasi secara optimal, lantas banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai MEA beserta tantangan dan potensinya. Kedua, masyarakat dinilai cenderung pasif, padahal untuk mewujudkan produktivitas dalam usaha kelautan guna mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia, masyarakat pesisir merupakan

faktor sentral utama. Maka, dengan aplikasi konsep *Blue economy* yang menyatu dengan konsep digitalisasi industri akuakultur akan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan lagi potensi wilayah nasional sehingga diharapkan menjadi basis utama untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan porsi besar dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data secara deskriptif dengan tujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dipahami (Singarimbun. 1989). Pengumpulan data menggunakan informan dan kehadiran peneliti. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di daerah pesisir Bali Utara, Singaraja dan salah satu desa penunjang pariwisata yaitu Desa Banjar, Kecamatan Banjar (bagian dari Kawasan Lovina). Analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan. Jenis data adalah data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kegiatan ekonomi ditinjau dari konsep *Blue economy* di kawasan pesisir Bali Utara

1. Kegiatan masyarakat di bidang pariwisata

Pengembangan kegiatan ekonomi ditinjau dari konsep *Blue economy* di kawasan pesisir Bali Utara. Kegiatan masyarakat di bidang pariwisata Dalam membentuk SDM yang berkualitas di bidang pariwisata, Provinsi Bali memiliki sejumlah lembaga pendidikan untuk mendidik dan menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata mulai dari SMK, LPK hingga Sekolah Tinggi Pariwisata. Di sejumlah lembaga pendidikan tersebut memang tidak semua diisi oleh masyarakat lokal, banyak masyarakat dari luar yang sedang belajar dan mengembangkan diri. Salah satu kegiatan dalam rangka pembentukan SDM yaitu diadakannya Pelatihan Kompetensi Dasar Karyawan *Front Line* Hotel Non Bintang Kawasan Penyangga Kuta Bali dari Asosiasi Hotel bersama kampus Politeknik Pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi semangat dan *confident* kepada para karyawan untuk mampu menjawab tantangan-tantangan ke depan, khususnya di Bali Utara, Singaraja.

2. Kegiatan masyarakat di bidang perikanan

Adapun sentra perikanan yang dikembangkan saat ini dipusatkan di wilayah Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Singaraja memiliki peran penting dalam sektor perikanan, baik sebagai pusat kegiatan penangkapan ikan maupun pengembangan budidaya perikanan. Namun, untuk menjadikan Bali Utara sebagai sentra ekspor perikanan perlu dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, infrastruktur jalan dan pabrik es. Sedangkan untuk perkumpulan nelayan sendiri, di desa ini masih belum terbentuk, yang terbentuk hanyalah kelompok- kelompok kecil di setiap pesisir dan terbentuk melalui sebuah komunitas. Seperti komunitas nelayan, budidaya rumput laut, dan tambak udang di wilayah tertentu. Yang ada hanya GAPOKTAN (gabungan kelompok tani) di Desa Banjar. Pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakatnya di bantu melakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pemuda melalui POKDARWIS yang kemudian di tempatkan disetiap obyek-obyek wisata. Jadi dengan berkembangnya pembangunan yang ada di sekitar Bali Utara, Singaraja juga dapat memberikan pengaruh tersendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap wilayah desa penunjang.

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi berbasis *Blue economy* terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi berbasis *Blue economy* terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di Bali Utara, Kabupaten Singaraja. Dalam suatu pengembangan kawasan wisata, akan terjadi masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi pemerintah dan masyarakat. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah program pengembangan di wilayah yang memiliki keunggulan, baik keunggulan geo-ekonomi maupun geo-strategis, yang berfungsi sebagai pusat bagi sektor industri dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Dalam studi ini, terdapat beberapa temuan penting terkait pengaruh KEK terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pertama, program KEK memiliki dampak positif terhadap investasi. Kedua, program KEK menghasilkan aglomerasi yang signifikan, salah satunya dapat meningkatkan kemajuan teknologi. Ketiga, upah rata-rata tenaga kerja meningkat sebesar 5%. Keempat, peningkatan investasi, pertumbuhan total faktor produksi, dan faktor harga. (Nurdiani, 2025).

Permasalahan tersebut muncul dari multi sektor, seperti ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Namun demikian, dampak positif yang akan muncul antara lain: **Pertama**, membuka lapangan kerja. **Kedua**, meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Bali Utara yang semakin dikenal, maka kunjungan wisatawan akan semakin meningkat dan berdampak pada naiknya pendapatan daerah pada khususnya, dan negara pada umumnya. **Ketiga**, *transfer* teknologi. Adanya kawasan pariwisata seperti di Bali Utara akan membentuk masyarakat yang pada awalnya belum mengenal IPTEK menjadi masyarakat modern yang menguasai IPTEK. Penguasaan IPTEK akan menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses segala masalah yang nantinya dapat diterapkan di wilayah kawasan pariwisata tersebut. Contohnya, tersedianya sarana komunikasi yang memadai, misalnya akses internet yang mudah (akses wifi). Komunikasi sudah mudah dilakukan karena tersedianya peralatan yang memadai, seperti handphone dan internet. Peralatan ini akan lebih mudah digunakan apabila akses internet juga mudah diperoleh. Sedangkan untuk suatu perusahaan di bidang industri perusahaan dengan intensitas teknologi tinggi cenderung mempekerjakan lebih sedikit pekerja terampil, menunjukkan komplementaritas antara teknologi saat ini dan tenaga kerja kurang terampil. Sebaliknya, perusahaan yang sangat inovatif lebih cenderung mempekerjakan pekerja terampil, menunjukkan adanya komplementaritas antara inovasi dan tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, kawasan wisata perlu menyediakan layanan akses internet. Selain itu bagi orang-orang yang memiliki homestay, restoran, vila, dan usaha lainnya, dapat membantu mempromosikan desa wisata untuk menarik kunjungan wisatawan melalui promosi setiap usaha yang dimiliki oleh masyarakat, serta secara tidak langsung membantu mempromosikan desa wisata melalui situs web, media sosial, atau agen perjalanan (Herry & Suyana, 2025).

Disamping dampak positif, masih ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dari adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Bali Utara, yaitu antara lain: **pertama**, terkikisnya nilai budaya akibat rendahnya tingkat pola pikir masyarakat terutama anak muda yang sangat mudah terpengaruh budaya luar. **Kedua**, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan kawasan wisata juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dampak-dampak yang perlu diperhatikan antara lain pengolahan limbah, pengolahan air bersih, drainase sebagai upaya preventif dalam menanggulangi banjir, *illegal logging* serta menanggulangi permasalahan sampah yang akan terjadi.

Adapun dampak dalam kegiatan pembangunan ekonomi maupun infrastruktur terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan itu sendiri secara keseluruhan pelaku usaha maupun masyarakat setempat menyatakan bahwa pariwisata berdampak terhadap pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi. Pengaruh yang dirasakan masyarakat dalam hal ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan karena berkembangnya pariwisata, sehingga banyak celah untuk mencari pemasukan, seperti merebaknya usaha kuliner, *souvenir*, *tour guide* dan lain-lain, sehingga mereka merasa pengaruh yang ditimbulkan dalam aspek ekonomi ini sangat signifikan.

Sedangkan dampak yang dirasakan dalam bidang sosial budaya mayoritas merasakan perubahan profesi masyarakat setempat serta perubahan gaya hidup yang cenderung mengikuti budaya barat. Serta adanya peralihan profesi yang terjadi dan secara menyeluruh merasakan perubahan yang besar dalam hal penataan ruang dan lingkungan.

Penerapan prinsip *blue economy* di kawasan ini dalam beberapa aspek bisa dibilang sudah terpenuhi seperti dalam aspek inklusi sosial dan *multipalyer effect* yaitu dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses kegiatan pembangunan yang dilakukan, pemberdayaan masyarakat serta bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata. Namun, untuk masalah lingkungan masih belum bisa dikaitkan sepenuhnya mengaplikasikan prinsip *Blue Economy* yang ramah lingkungan dan *sustainable* dilihat dari berbagai gangguan yang ditimbulkan serta penggunaan lahan dan alam yang berlebihan menimbulkan kerusakan alam. Selain itu pemerintah harus menindak tegas, menerapkan reformasi struktural, dan menetapkan kerangka regulasi yang kredibel untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan (Nita; Romi & Diah, 2025)

KESIMPULAN

Dalam aspek ekonominya sendiri sudah memberikan dampak yang sangat positif bagi pelaku usaha dan masyarakat baik itu dari desa penyangga dan desa itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak pengelola dan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja ahli dibidangnya serta kreatifitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, terutama di dalam bidang kepariwisataan. Namun demikian disegala aspek pembangunan tidak akan pernah luput dengan yang namanya pro-kontra, positif dan negatif. Dimana, tidak sedikit masyarakat yang sadar akan dampak negatif dari pengembangan kegiatan pariwisata, termasuk kerusakan lingkungan.

Pembangunan juga didesain sesuai dengan ekosistem bekerja, karena diakui bahwa alam bekerja secara efisien. Prinsip efisiensi sumber daya alam tersebut dianut dalam *Blue economy*. Namun, dalam kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan masih belum bisa dikatakan sepenuhnya memuat unsur-unsur *Blue economy* yang mengedepankan prinsip *sustainable* dan ramah lingkungan, karena banyaknya lahan-lahan yang telah rusak sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan Bali Utara yang menuai banyak sengketa dengan masyarakat secara fundamental tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- A.H. Rahadian.2016. *Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy*, Volume III, No. 01:46-56.
- Dewan Nasional KEK. Agenda Prioritas. <http://kek.go.id/kek-indonesia>. diakses 20 Juli 2021.
- Dimas Tegar R, RO Saut Gurning.2018. *Pengembangan Wisata Bahari dan PesisirBerdasarkan Ekonomi Biru*, Vol.02: 128-132
- Disruptive Technology, Skills, and Tasks: Evidence from Indonesia* Published By: Teguh Yudo & Carlos Mangunsong. <https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2524317>
- Herie Saksono, 2013. *Ekonomi Biru : Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas* , vol 5 No.1:1-13
- I Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi. 2015. *Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Processn (AHP) Approach*, Vol.10 No.47-48
- I Putu Herry Mahendra Putra, Erlania dan Made Suyana Utama. 2025. *Determinan Of Tourism Village Development On Community Welfare In Tabanan District*, Vol.10 No.1 :47-59. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/114276/59169>
- Ichwan Haryanto. 2015. *Proses Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara Dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke*, Vol 3 No.1
- Mira, Maulana Firdaus dan Elly Reswati. 2014. *Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*, Vol. 9 No.1:17-23
- Nicholas Kathijotes. 2013. *Ekonomi Biru - Lingkungan dan Perilaku Aspek Menuju Pembangunan Pesisir Berkelanjutan, Konferensi Internasional AMER Tentang Kualitas Hidup, langkawi, Malaysia*, doi: 10.1016 7 – 13
- Nota Morra Banu Ghalidza, 2020. *Konsep Blue Ekonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Vol.22 No.01

- Nita, Romi, Diah 2025. *Does Public Debt Affect Economic Growth? An Empirical Investigation Of Upper–Middle-Income Countries*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/114046/59163>
- Nurdiana Kholida Oktaviana, 2025. *The Impact Of Tourism Special Economic Zones (Sezs) In Encouraging Regional Economic Growth*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/122138/59166>
- Penerapan konsep ekonomi biru di kuta Mandalika.
<https://foto.bisnis.com/view/20180918/839532/javascript>
- Prof. Dr. Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*; Bandung Alfabeta
- Rendi Prayuda, Dian Venita Sary. 2019. *Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Vol. 3 No. 2: 46-64.
- Sejarah pembangunan kawasan ekonomi khusus.
http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pembangunan-kawasan-ekonomi-khusus
- Sumarmi, Elya Kurniawati, Muhammad Aliman, 2020. *Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Untuk Membangun Ekonomi Biru dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Pembangunan Wisata Ikan di Klatak, Tulungagung, Indonesia*, Vol.31(3), 979–986. <https://doi.org/10.30892/gtg.31307-530>
- Susanto D. 2011. *Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Unggulan dan Kesenjangan Pada Empat Kabupaten di Pulau Madura*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1: 42-62
- Sustainable Tourism in the Nature and National Parks of Europe* John Anfield, *The George Wright Forum* Vol. 10, No. 4 (1993), pp. 87-94 (8 pages) Published By: George Wright Society